

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Hal ini disebabkan oleh kontribusi PAD, dana perimbangan, dan SiLPA dalam menentukan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja modal. Semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga mendorong peningkatan belanja modal. Meskipun demikian, alokasi belanja modal tetap harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan lainnya yang bersifat lebih mendesak. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula kebutuhan masyarakat terhadap barang publik, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal.

2. Secara parsial, pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, sehingga pendapatan yang dihasilkan belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan belanja modal secara signifikan. Akibatnya, daerah dengan penerimaan PAD yang rendah tidak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melakukan investasi pembangunan yang bersifat jangka panjang, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah yang memerlukan alokasi anggaran yang besar. Dengan demikian, perubahan dalam PAD tidak selalu diikuti oleh perubahan yang signifikan pada alokasi belanja modal, karena kontribusi PAD terhadap belanja modal masih sangat terbatas di beberapa daerah.
3. Secara parsial, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yang menjadi salah satu sumber dalam pemberian belanja modal, terutama bagi daerah dengan kapasitas pendapatan asli daerah yang terbatas. Dengan demikian, kenaikan dana perimbangan akan diikuti dengan peningkatan belanja modal, karena bertambahnya dana perimbangan yang diterima akan memperbesar kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pengeluaran modal.

4. Secara parsial, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas anggaran dari SiLPA memungkinkan pemerintah daerah menggunakan kelebihan anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai belanja modal. Dengan demikian, kenaikan SiLPA akan diikuti dengan peningkatan belanja modal, karena bertambahnya SiLPA yang diterima akan memperbesar kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja modal.
5. Secara parsial, kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Hal ini disebabkan karena belanja modal ditujukan untuk pembangunan jangka panjang, sementara penanggulangan kemiskinan memerlukan intervensi jangka pendek yang lebih tepat jika dilakukan melalui belanja sosial atau bantuan langsung. Selain itu, alokasi belanja modal lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keuangan, seperti kapasitas fiskal daerah, arah prioritas kebijakan daerah, dan ketergantungan pada dana transfer pusat, daripada oleh tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. Dengan demikian, kemiskinan bukan merupakan determinan utama dalam keputusan penganggaran belanja modal di tingkat daerah, karena dalam jangka pendek kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran guna meningkatkan porsi belanja pada sektor-sektor strategis, seperti penguatan infrastruktur pelayanan publik. Hal ini penting mengingat proporsi belanja modal masih belum mencapai batas minimal 40% dari total belanja APBD. Komitmen untuk meningkatkan alokasi belanja modal secara bertahap perlu diperkuat, sejalan dengan peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih selaras. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaksanaan anggaran juga diperlukan agar belanja modal benar-benar terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi kepentingan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana perimbangan yang diterima dapat dikelola secara optimal dalam membiayai pengeluaran yang sifatnya produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, serta proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengalokasian dana perimbangan ke dalam sektor-sektor tersebut penting untuk menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*), seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang, serta memperkuat konektivitas antardaerah. Selain itu, ketergantungan yang besar terhadap dana transfer

dari pemerintah pusat juga perlu diimbangi dengan sumber pendapatan alternatif lain. Salah satunya dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah baru yang berbasis pada potensi unggulan daerah, seperti sektor pariwisata berbasis budaya di Provinsi DIY, ekonomi kreatif, dan pengelolaan aset daerah secara profesional. Selain itu, perluasan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) berperan penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi iklim investasi yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal tertentu, serta pembangunan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

3. Pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara lebih efektif dan akuntabel agar tidak terjadi akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang berlebihan dari tahun ke tahun. SiLPA yang terlalu besar dapat menjadi indikator ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran, baik karena lemahnya perencanaan, keterlambatan proses pengadaan, atau rendahnya kapasitas pelaksanaan program. Padahal, dana yang mengendap tersebut seharusnya bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem perencanaan

dan penganggaran sangat diperlukan, termasuk sinkronisasi antara dokumen perencanaan (RKPD, Renja SKPD) dengan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen program dan keuangan.

Selain itu, keberadaan SiLPA harus dipandang bukan hanya sebagai sisa anggaran, tetapi sebagai potensi sumber pembiayaan tambahan yang dapat dimanfaatkan secara strategis, khususnya untuk mendorong percepatan realisasi belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah daerah dapat menyusun skema pemanfaatan SiLPA secara terencana, misalnya untuk membiayai proyek infrastruktur prioritas, pembangunan fasilitas layanan publik, atau program pengembangan ekonomi lokal yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi SiLPA tidak hanya mencegah pemborosan anggaran, tetapi juga berkontribusi dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat daya saing daerah. Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi anggaran juga penting untuk memastikan bahwa SiLPA yang timbul benar-benar bersifat produktif dan bukan akibat dari kelambanan birokrasi atau lemahnya penyerapan.

4. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan aspek lain di luar faktor keuangan dalam mengalokasikan belanja modal, seperti permasalahan kemiskinan yang meningkat di suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan pembiayaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, daerah tersebut dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga terbebas dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu responsif dalam mengalokasikan belanja modalnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil yang diperoleh, sehingga diperlukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada empat variabel, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan kemiskinan. Akibatnya, nilai koefisien determinasi yang diperoleh hanya sebesar 47,2%, sehingga masih terdapat faktor lain di luar variabel penelitian yang turut memengaruhi belanja modal. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi belanja modal, baik yang bersumber dari aspek keuangan seperti penerimaan daerah, maupun aspek nonkeuangan seperti kondisi makroekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Dengan begitu, temuan yang dihasilkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai beragam faktor yang berperan dalam menentukan belanja modal.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini terbatas pada belanja modal, tanpa menganalisis pengaruhnya terhadap variabel lain. Misalnya, belanja modal

yang tinggi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, aspek ini belum dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak belanja modal terhadap pembangunan daerah.

3. Lokasi dalam penelitian ini terbatas pada daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian yang diperoleh belum tentu berlaku untuk daerah lain yang memiliki perbedaan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kapasitas fiskalnya. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan aplikatif, misalnya dengan melakukan perbandingan belanja modal di seluruh wilayah Pulau Jawa atau daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi beragam.